

# MEMBANGUN PERADABAN YANG LEBIH ADIL

**Budiono Kusumohamidjojo** | Universitas Katolik Parahyangan  
Bandung, Indonesia

## ABSTRACT

The widespread misperception about identity has apparently led to identity absolutism that is also reflected in the quest for absolute truth. The consequence of this mindset has placed mankind in a “confederation of cultures” (Amartya Sen) that ultimately fails to deliver a peaceful and just co-existence. As if human suffering is yet to be hardened, globalization brought more burden into the drama. We are like destined to watch human civilization split into various conflicting civilizations. As mankind has reached an unprecedented complex *Lebenswelt* (Edmund Husserl), we need to develop a kind of global civilization (to reconcile the effects of globalization) that is more just in order for the human race to retain its existence and co-existence. Ways and means need to be determined for that purpose, however, argumentative dialogue still seems to be the main avenue to achieve that end. For its own sake Indonesia has the obligation to contribute to the development of a more just global civilization. Such obligation is indeed implied in the Preamble of its 1945 Constitution. Otherwise

Indonesians risk to be at the mercy of arbitrary forces of globalization. Nevertheless, Indonesia's capacity to participate at and contribute to the process of developing a more just civilization depends very much on improvement of the qualities of its citizens, which in turn requires adjustment of mindset with the ongoing process. Efforts to adjust our mindset will need the rendering of subjects on social ethics (*budi pekerti*), world history and global geography starting with the elementary school. Only with reasoning citizens will Indonesia be able to participate in the development of a more just civilization and thereby also improve its own well being.

**Key Words:**

•Peradaban •Identitas •Extensive Identity •Subjek •  
Lebenswelt •Pluralisme •Absolutisme •Level playing field •  
Globalisasi •Keadilan

### **Membangun Peradaban yang Lebih Adil<sup>1</sup>**

Perumusan judul di atas mendapatkan inspirasinya dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI yang menetapkan saya dalam jabatan Guru Besar dalam Ilmu Filsafat Hukum, dan bukannya dalam ilmu filsafat atau ilmu hukum. Dengan begitu Menteri secara lugas mengambil jarak terhadap kedudukan filsafat hukum yang unik dalam tatanan studi perguruan tinggi, tidak hanya di Indonesia, melainkan nampaknya juga di seluruh dunia. Keunikan itu datang dari kenyataan bahwa di satu sisi filsafat hukum adalah cabang dalam ilmu filsafat, dan bukan cabang dalam ilmu hukum. Tetapi di sisi lain, sejauh yang saya tahu, filsafat hukum tidak pernah masuk dalam kurikulum di suatu fakultas filsafat, termasuk juga fakultas filsafat Universitas Parahyangan. Sebaliknya dia malahan merupakan mata kuliah wajib di kebanyakan fakultas hukum, baik di Indonesia, di Jerman mau pun di banyak negara lain, termasuk juga fakultas hukum Universitas Parahyangan. Sebagai bagian dari ilmu filsafat, dia bertugas menggarap pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan dasar dan acapkali malahan metafisis mengenai hukum yang dicari jawabannya pada tataran filsafat. Itulah sebabnya, mengapa Arthur Kaufmann menerangkan hubungan itu sebagai berikut: Dalam filsafat hukum, pertanyaan diajukan oleh sang yuris, sedangkan jawabannya diberikan oleh sang filosof.<sup>2</sup>

Uniknya kedudukan disipliner filsafat hukum sebagai bidang studi membuat dia sarat dengan persoalan tentang peradaban, karena sebagai filsafat, dia tidak bisa menghindarkan diri dari pertanyaan besar dan mendasar tentang aktualisasi diri manusia yang sarat dengan enigma. Namun, setiap peradaban juga sarat dengan masalah keadilan, dan karena itu pada gilirannya juga sesak dengan beban kekuasaan yang selalu cenderung mengkebiri keadilan. Bukankah kita tidak bisa mengatakan, bahwa monumen-monumen peradaban seperti piramida-piramida Mesir dan Inca atau candi-candi Angkor dan Borobudur telah didirikan berdasarkan cinta-kasih dan kerinduan akan keabadian belaka? Bahkan *the Great Wall of China* yang sudah mulai dirintis pembangunannya oleh kaisar Qinshihuang-di (terlahir Ying Zheng, 259-210/sM) pada abad III/sM terang-terangan merupakan interpretasi Max Weber (1864-1920) 21 abad kemudian tentang interesse terhadap kekuasaan. Dengan memasang judul tersebut di atas, saya memang hendak memfokuskan diri pada dua aspek yang menurut hemat saya adalah yang paling penting dan saling menyandera dalam *Lebenswelt* manusia di awal abad XXI ini: peradaban sebagai puncak kebudayaan serta urgensi untuk membuat proses pemberadaban itu juga menjadi semakin adil. Jika kebudayaan merupakan realisasi kompleksitas kehidupan manusia sebagai kebersamaan dan masa depannya, maka keadilan yang seyogianya dicapai lewat pranata hukum itu adalah substans yang membuat kehidupan bersama manusia itu menjadi berbeda dari segala bentuk kehidupan yang ekstra human dalam alam semesta ini. Dalam abad IV/sM Aristoteles (384-322/sM) sudah menyatakan bahwa hanya malaikat (yang *supra human* dan karena itu illahiah semata) dan hewan (serta segala makhluk yang *in-human* mau pun *sub-human* yang karena itu alamiah semata) yang tidak memerlukan hukum dan keadilan. Manusia memerlukan keadilan justru karena dengan hukum dia mampu mengatur dan membatasi kebebasannya sendiri. Manusia itu jadinya seperti digelantungi kodrat yang mewajibkannya untuk terus menerus membuat keputusan tentang pilihan-pilihan bagi hidup yang dijalaninya.

### **Membongkar Peradaban Absolut**

Dalam kenyataan sejarahnya, manusia acapkali memang memutuskan pilihan untuk memperadabkan atau membiadabkan pola kehidupan bersamanya. Pada tingkat peradabannya yang sekarang, manusia telah mencapai suatu kompleksitas yang tiada presedennya dalam sejarah kebudayaan. Kompleksitas itu juga mencakup hukum yang telah dia ramifikasi dengan cara sedemikian rumit sehingga manusia kerap kali telah

menyesatkan dirinya sendiri (Jean Baudrillard, 1929-)<sup>3</sup> dalam menuju suatu masa depan yang untuk banyak orang bukan hanya tidak bisa dihindarinya, melainkan acapkali juga tidak bisa difahaminya, apalagi memastikannya. Helmut Schmidt, mantan kanselir Jerman dekade 1970-an pernah mengakui bahwa dia sulit sekali memahami rumusan aturan yang tercantum dalam rekening tagihan listrik rumahnya. Karena itu saya menangkap urgensi untuk mengedepankan lagi prinsip-prinsip yang paling sederhana dari kompleksitas yang telah dicapai umat manusia tersebut untuk mengingatkan kembali, bahwa pada akhirnya manusia hanya bisa mengandalkan dirinya dan karena itu harus tetap menjadi subjek atas dirinya jika dia masih hendak menyelamatkan kemanusiaannya. Kecuali jika dia memang hendak menyerahkan nasibnya pada suatu subjektivitas yang lain daripada dirinya sendiri yang *nota bene* berada di luar yurisdiksi kognisinya. Sudah barang tentu posisi ini menempatkan diri di luar kubu para pemikir anti-subjek seperti misalnya Claude Lévi-Strauss (1908-), Jacques Lacan (1901-1981) atau Michel Foucault (1926-1984). Salah satu tokoh besarnya, Lévi-Strauss misalnya pernah menyatakan bahwa “alam dimulai tanpa manusia dan akan berakhir tanpa manusia”.<sup>4</sup> Karena itu saya mengalami hambatan besar untuk mengabaikan konstataasi René Descartes (1596-1650) tentang kesadaran sebagai dasar dari subjektivitas manusia.<sup>5</sup> Bahkan Jürgen Habermas misalnya masih membela pandangan Descartes ini dengan memaklumkan subjektivitas sebagai pengertian yang mendasar dan niscaya untuk menjamin proses pembuktian dan kepastian, atas dasar mana segala yang selebihnya bisa diragukan dan dikritisi.<sup>6</sup>

Karena kita tidak pernah dapat memprediksikan masa depan kehidupan bersama manusia, yang maksimal dapat kita upayakan adalah merencanakannya. Dan seperti yang sudah manusia sering alami dalam sejarah rasinya, perencanaan itu dapat meleset. Dengan perencanaannya yang acapkali meleset, bisa meleset jugalah kognisinya tentang identitasnya sendiri, dan apalagi tentang kebenaran atau paling sedikit tentang makna. Sejarah jugalah saksi setia yang memastikan betapa kerapnya manusia salah memakna kebenaran, sambil sekaligus juga sebenarnya tidak pernah tahu, kategori kebenaran yang mana harus dia gunakan untuk memakna kebenaran dengan benar. Kenyataan itu sebenarnya sekaligus merupakan dasar alamiah untuk mengambil jarak yang signifikan terhadap kebenaran absolut dan absolutisme lainnya. Dalam kenyataannya, karena manusia memang mempunyai kapasitas kebebasan untuk juga menentang dasar alamiahnya sendiri, sebagian lantas malahan mengejar absolutisme itu habis-habisan, baik dalam bentuk identitas absolut mau pun kebenaran absolut dan tak jarang juga kekuasaan absolut. Kita memang tidak bisa

menghindari, bahwa di dunia dan di segala waktu selalu saja ada yang mengklaim kebenaran absolut dan karena itu merasa berhak juga memiliki wewenang absolut untuk memaksakannya kepada subjek lain. Tentang mereka Jimm Leffel menulis: *“People who believe in absolute truth are dangerous”*.<sup>7</sup> Pernyataan ini memang kedengaran ekstrem. Kendati begitu memang ada alasan untuk menjelaskan mengapa sebagian orang seperti mendambakan kebenaran yang mutlak: *“There is kind of loneliness in the claim to universal truth as it is driven by the need of the human being to overcome his/ her fear of his/ her own secure end. History has witnessed a complex diversity in the struggle of mankind to overcome this fear: “some found it in churches, some in laboratories; some believed in intuition, others in experiment, or in mystical visions, or in mathematical calculation”*.<sup>8</sup>

Persoalannya adalah: kebenaran itu berbanding lurus dengan kekuasaan. Maksudnya, yang tidak yakin dengan kebenaran tetapi merasa harus berkuasa untuk bisa membuat kebenaran sendiri lantas membangun ideologi sebagai substitusi kebenaran (misalnya dalam stelsel Karl Marx: 1818-1883 dan Vilfredo Pareto:1848-1923). Pada gilirannya ideologi memang bisa tampil dengan wajah yang aneka-ragam, termasuk juga dengan wajah yang seolah-olah illahi guna membenarkan kekuasaannya sendiri. Belum lama ini Walid Jumblatt, pemimpin kaum Druze Libanon mengambil sikap yang jelas terhadap obsesi serupa itu. Dia baru-baru ini menyatakan bahwa *“Anybody who claims to have divine authority is crazy. Anybody”*.<sup>9</sup> Dengan pernyataan itu dia tidak hanya merujuk kepada Nasrallah yang disebut-sebut sebagai “sang bintang” dalam perang sebulan dengan Israel musim panas tahun 2006 yang memang (berhasil) merubah paradigma dominasi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga siapa pun, termasuk George Walker Bush yang menjadi pecundangnya. Richard Haass mengidentifikasi paradigma baru itu dengan menyatakan bahwa: *“the American era in the Middle East is over”*.<sup>10</sup>

Jika klaim tentang kebenaran dan kekuasaan illahi datang dari aliran pikir peradaban yang berbeda-beda dan lantas bertumburan seperti yang sekarang bisa kita amati, pecahnya konflik keras seperti yang terjadi berulang-kali dalam sejarah lantas menjadi logika sederhana semata. Seringkali memang sukar memisahkan “peradaban” dari “kebudayaan”, karena seperti kata Samuel Huntington (1927-): *“Civilization and culture both refer to the overall way of life of a people, and a civilization is a culture writ large. They both involve the values, norms, institutions, and modes of thinking to which successive generations in a given society have attached primary importance”*.<sup>11</sup> Tentu saja Huntington juga merasa perlu menajamkan pemahaman tentang peradaban, untuk mana dia merujuk pada Wallerstein yang mendefinisikan peradaban sebagai *“particular concatenation of worldview, customs, structures, and*

*culture (both material culture and high culture) which forms some kind of historical whole and which co-exists (if not always simultaneously) with other varieties of this phenomenon*".<sup>12</sup>

Huntington memang seperti "berhasil" mengajukan definisi tentang kebudayaan dan peradaban sembari menyimpulkan bahwa peradaban itu pada akhirnya merupakan kulminasi dan sublimasi dari kebudayaan-kebudayaan yang unggul dan mandiri dan dengan sendirinya sarat dengan potensi untuk memaksakan dominasi. Huntington tidaklah sendirian dalam menginsiniasi peradaban yang ramah dengan imperialisme, khususnya imperialisme Amerika Serikat.<sup>13</sup> Sukses Huntington itu tidak pelak lagi menghasilkan segregasi rumpun-rumpun kebudayaan dan peradaban, yang celaknya secara tidak sadar memang digelontorkan oleh orang-orang yang sedang paling berkuasa dalam sejarah dunia ini. Dengan cara begitu fakta memang seperti ditegakkan lewat definisi dan bukan oleh kognisi, betapa pun bisa melesetnya definisi itu (ingat Michel Foucault yang pernah bilang bahwa kebenaran itu dibikin dan bukannya dicari seperti yang diyakini Sokrates 25 abad yang lalu). Artinya, dalam kerangka Huntington, peradaban dan definisi itu bisa kita kotak-kotakan, dan tidak jarang sebatas stereotipe dan kemalasan kita sendiri. Amartya Sen membaca kecenderungan ini dan berargumen bahwa identitas yang senantiasa lekat dengan peradaban itu memang niscaya mengalami absolutisasi yang fatal jika dia ditarik melalui batas-batas yang fragmenter, apalagi garis-garis yang linear.<sup>14</sup> Itulah cara pikir yang menurut Sen menghasilkan "*confederation of cultures*" yang acapkali sarat dengan konflik. Dalam kerangka problematik identitas yang absolut, Sen memproyeksikan peradaban seperti yang dibayangkan oleh Huntington sebagai ilusi yang menyesatkan belaka. Pertama, karena dengan identitas yang absolut, nalar dan kebebasan untuk melakukan pilihan dan membuat keputusan kehilangan relevansinya, justru karena kedua, kelangsungan peradaban itu terutama melibatkan soal nalar dan kebebasan untuk menjatuhkan pilihan-pilihan.

Posisi Jumlatt dan Sen sebenarnya mengarah kepada kesimpulan yang sejalan, yaitu bahwa klaim untuk menyatakan memiliki kebenaran satu-satunya adalah klaim yang absurd yang sulit menemukan realisasi selama kita tinggal di dunia ini. Perdebatan metafisik tentang apakah realitas itu tunggal (monistik, dan karena itu mutlak) atau jamak dan aneka-ragam (pluralistik, dan karena itu relatif) sudah dimulai enam abad sebelum Masehi oleh para pemikir Yunani. Masalahnya adalah, kedua tata-pandang itu mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri. Dilemma itu sudah disadari oleh Parmenides (515-449/sM) manakala dia mengajukan apa yang dikenal sebagai "dilemma Parmenidian" yang intinya adalah pengakuan bahwa teori

bisa benar, selagi realitasnya tidak benar. Jika diterapkan pada realitas kita lantas tidak bisa menyangkal bahwa alam semesta itu memang satu, seberapa pun infinitnya dia, tetapi bersamaan dengan itu dia menampilkan keaneka-ragaman yang sangat rumit. Tidak terlalu lama kemudian Demokritos (460-370/sM) sang penyusun teori atom yang pertama ikut mengakui kebuntuannya dan sesungguhnya sekaligus juga kebuntuan umat manusia dalam menghadapi dilemma ini: *“That in reality we do not know how each thing is or is not, has been shown many times... in reality we know nothing, for truth is in the depths”*.<sup>15</sup> Demokritos mungkin terlalu dramatis, tetapi dalam kenyataannya manusia memang tidak pernah puas dengan kebenaran yang telah “dicapainya”, karena setelah itu dia selalu mempertanyakan kebenaran yang berikutnya yang kadangkala dan seharusnya lebih benar.

### **Peradaban dan *Extensive Identity***

Kita jadinya tidak punya pilihan lain selain dari menerima alam semesta dan umat manusia sebagai pluralitas yang pada gilirannya sulit menggelar tempat untuk absolutisme. Anthropologi sudah menjelaskan, bahwa pluralisme manusia dan kebudayaannya itu menghasilkan bukan hanya multi-kulturalisme, melainkan sebagai konsekuensi logisnya bahkan juga relativisme kultural. Dengan sendirinya multi-kulturalisme dan relativisme kultural yang diakibatkannya tidak otomatis menjanjikan perdamaian dan malahan bisa sarat dengan konflik. Dengan begitu memang ada risiko bahwa kebersamaan hidup manusia itu, apalagi dalam cakupan global, menjadi disharmoni yang kompleks. Itulah sebabnya Habermas mengusulkan agar tindakan yang komunikatif (*kommunikatives Handeln*) dibudayakan untuk mengembangkan rasionalitas dalam hubungan antar-subjek (yang bisa dibaca sebagai hubungan antar-warga-negara) supaya pluralitas itu tidak menjadi disharmoni belaka.<sup>16</sup> Dengan cara begitu setiap dialog mendapatkan kemungkinan lebih besar untuk naik kelas menjadi diskursus yang lebih argumentatif namun tidak harus konfrontatif. Kendati begitu pembudayaan itu secara pragmatis memprasyaratkan para peserta argumentasi, bahwa pada prinsipnya semua peserta terlibat secara bebas dan setara dalam proses kerjasama pencarian kebenaran, dalam proses mana hanya argumen yang lebih baik yang boleh dipaksakan. Dengan cara begitu besarlah kemungkinan, bahwa kesadaran subjektif menjelma menjadi kesadaran kolektif.<sup>17</sup>

Pengakuan akan pluralitas membawa konsekuensi jauh bagi manusia untuk memahami dirinya melalui cara dia melakukan identifikasi terhadap

dirinya. Tergantung dari bagaimana manusia membaca identitas dirinya, dari sana juga dia bisa ikut menyumbang atau ikut merusak harmoni dalam *Lebenswelt* bersama (Edmund Husserl, 1859-1938). Pada awal tahun 1960-an Herbert Marcuse (1898-1979) sudah memperkarakan penyempitan identitas manusia sebagai *one dimensional man* yang merupakan konsekuensi dari melesatnya industri maju.<sup>18</sup> Setelah hampir lima dekade, Marcuse malahan akan menghadapi masalah yang lebih besar, seperti yang *nota bene* ditangani oleh Sen. Industrialisasi dalam kenyataannya telah menggerilya format peradaban (mana pun) sedemikian rupa, dengan akibat bahwa manusia terhempas dalam kesunyian (seperti sudah dikonstatasi lebih dulu oleh Erich Fromm (1900-1980)<sup>19</sup> sambil bersamaan dengan itu dia tersedot dalam dunia identitas yang warna-warni. Untuk Sen sudah seperti keniscayaan, bahwa “*in our normal lives, we see ourselves as members of a variety of groups: we belong to all of them*”.<sup>20</sup> Sen menyebutnya “*extensive identity*”.<sup>21</sup> Sebagai contoh Sen menggambarkan dirinya sendiri sebagai seorang Asia, warga-negara India, keturunan Bengali, pemukim Amerika Serikat atau Inggris, ekonom, filosof amatir, penulis, ahli Sanskrit, pengagum sekularisme dan demokrasi, seorang pria yang feminis, seorang heteroseksual, pembela hak azasi kaum gay dan lesbian dengan gaya hidup yang tidak religius, dengan latar-belakang Hindu yang bukan Brahmin dan tidak percaya pada kehidupan sebelum dan sesudah kehidupan yang kini.<sup>22</sup> (Dia tidak menyatakan bahwa dia juga pemenang Hadiah Nobel).

Kita bisa punya format identitas masing-masing yang bisa saja bersentuhan atau bahkan juga bertautan dengan berbagai identitas lain dalam satu atau sejumlah aspek kehidupan. Sehari-hari bisa saja saya menikmati bekerja dengan sekelompok orang dengan latar-belakang yang amat beraneka-ragam, sambil dalam hari-hari kerja yang panjang itu kami bekerja dengan aturan main yang sama dan menjalankan loyalitas profesi yang sama. Seperti tutur Sen, kita sering tidak bisa memilih lain: “*The point at issue is not whether any identity whatever can be chosen (that would be an absurd claim), but whether we do indeed have choices over alternative identities or combinations of identities*”.<sup>23</sup> Dengan begitu, bukan hanya untuk Huntington atau Marcuse atau Amartya Sen, melainkan sebenarnya untuk setiap orang di zaman kita sudah tidak bisa lagi berlaku identitas yang absolut seperti yang digagas oleh Aristoteles 24 abad yang lalu dengan prinsip identitasnya, karena perkembangan peradaban manusia sendiri juga yang telah mengimbas evolusi identitas itu sehingga lantas berlangsung sungguh-sungguh *cross cultural*.



## Dialog Pemberadaban dan Demokrasi

Pengakuan yang realistik akan pluralitas dunia serta konsekuensinya menjadi penting untuk memahami bahwa sejarah tidak pernah menjanjikan keadilan yang sempurna, sama seperti dunia tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari konflik. Sejarah sudah membuktikan dengan empiris, bahwa identitas yang sempurna, kebenaran yang sempurna dan keadilan yang sempurna bukanlah bagian daripadanya. Jadi selama kita merupakan bagian dari sejarah, upaya untuk memperebutkan kesempurnaan-kesempurnaan itu dalam kerangka sejarah sebenarnya merupakan ilusi semata. Kendati begitu kita bisa membangun peradaban secara sinambung dengan tatanan yang semakin memungkinkan diselenggarakannya keadilan yang terus-menerus menjadi lebih adil, yang pada gilirannya akan menurunkan frekuensi mau pun intensitas konflik. Memang pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bangun tatanan seperti itu. Kunci besarnya masih terletak pada dialog yang diselenggarakan mulai dari tingkat rukun tetangga sampai kepada tingkat global. Dalam stelsel Habermas, dialog itu mensyaratkan para peserta dialog untuk mengakui dan menerima keunikan sesama peserta dialog.<sup>24</sup> Dialog paling sedikit membuat orang bertemu dan mengenali mitra dialognya. Melalui dialog orang akan dipaksa untuk menjalankan *kommunikatives Handeln* (kecuali kalau dia mau mengambil risiko dituduh tidak beritikad baik), yang pada gilirannya akan membuat masyarakat manusia menjadi *reasoning public* (publik yang menalar). *Reasoning public* itu dalam prosesnya niscaya akan mendongkrak warga-negara menjadi *reasoning citizens* yang tidak akan sembarangan ngamuk atau latah bahkan juga untuk soal-soal yang menyangkut pilihan-pilihan bagi *Lebenswelt*.

Saya pikir paradigma dialog yang menanjak sebagai diskursus argumentatif ini seharusnya juga berlaku bagi berbagai proses demokratisasi di dunia yang sejumlah di antaranya berlangsung hanya seperti mode yang dipantas-pantaskan. Jika paradigma ini berlaku bagi proses demokratisasi, berlakulah apa yang dikemukakan oleh Castiglione dengan merujuk kepada argumen dari de Tocqueville yang menyatakan, bahwa memang ada “*a law of justice that applies to society in general, where sovereignty belongs to mankind as a whole*”, suatu hukum yang berlaku sebagai suatu “*superior law*” terhadap “*democratic majoritarianism*”. Artinya, bahkan mayoritas politik yang sedang berkuasa sekali pun tidak boleh mengabaikan “*a law of justice that applies to society in general*” yang juga berlaku bagi kaum mayoritas seperti *the Grand Old Party* andaikata mereka sedang terpaksa menjadi oposisi.<sup>25</sup> Tidak kurang dari Pangeran Saud al-Faisal dari Saudi Arabia yang menyatakan bahwa “*Democracy is not the right of the majority alone*.”

*It is also the protection of the rights of the minority*".<sup>26</sup> Kedua pandangan ini mengingatkan kita, bahwa demokrasi itu pada akhirnya adalah wahana dan bukan tujuan final yang sebenarnya dari kehidupan bernegara. Artinya, jika demokrasi diselenggarakan sebagai wahana bukan oleh *reasoning citizens*, dia bisa saja gagal mengantarkan suatu masyarakat kepada *Lebenswelt* yang lebih baik. Itulah yang nampaknya disadari betul oleh Vladimir Putin sehingga dengan sinikal dia menyatakan "*We certainly would not want to have the same kind of democracy as they have in Iraq*".<sup>27</sup> Dalam konstelasi seperti itu, demokrasi memang menjadi ilusi belaka.

*Reasoning citizens* yang rata-rata memiliki *extensive identity* itu niscaya akan lebih banyak saling berinteraksi ketimbang saling memagari sebagai situasi yang tipikal bagi mereka yang mengurung diri dalam kompleks identitas absolut. Peradaban dengan sendirinya juga akan memperoleh wajah baru dengan batas-batas lugas yang mengalir di antara kawasan-kawasan pluralitas. Amartya Sen mengungkapkan kegusarannya ketika menanggapi konsep Huntington tentang *Hindu civilization*. Untuk Sen, identifikasi peradaban Hindu (India) itu merupakan upaya (yang boleh jadi tidak sengaja) untuk meminiaturkan suatu peradaban. Untuk Sen, peradaban Hindu yang merupakan mispersepsi dari Huntington itu dalam kenyataannya juga meliputi masyarakat Muslim dan kebudayaannya (dengan 147 juta penganutnya, ketiga terbanyak di dunia)<sup>28</sup>, Sikh, Parsi, Nasrani dsb. Sen sebaliknya malahan menekankan keunggulan (peradaban) India dengan sistem politiknya yang demokratis yang memungkinkan, bahwa dengan mayoritas Hindu 80%, pada saat yang sama sekarang ini India memiliki seorang presiden Muslim, seorang perdana menteri Sikh dan seorang pemimpin *ruling party* wanita yang berlatar belakang Nasrani.<sup>29</sup>

### **Proses Pemberadaban dan Globalisasi**

Tatanan *reasoning citizens* yang rata-rata memiliki *extensive identity* itu belum lagi dengan sendirinya menjawab soal tentang peradaban yang lebih adil. Kita masih harus menjawab pertanyaan tentang bagaimana rupa peradaban yang lebih adil itu. Peradaban dunia yang sangat terfragmentasi seperti sekarang ini jelas merupakan peradaban yang jauh dari adil. Untuk Habermas yang filosof, tidak ada solidaritas dalam *Lebenswelt* kita sekarang. Sedangkan untuk Sen yang ekonom, globalitas sekarang tidak membuka persamaan akses menuju kehidupan yang lebih baik. Proposal Habermas yang minta agar warga masyarakat saling "mengakui dan menerima keunikan sesama peserta dialog" nampak lumayan utopis dan sentimental sehingga tidak begitu saja bisa diwujudkan. Sulit membayangkan bahwa

seorang presiden direktur suatu perusahaan konglomerat mengakui dan menerima keunikan Mang Ija sebagai sesama peserta dialog di rukun tetangganya yang pluralistik, karena yang akan terjadi adalah, bahwa Mang Ija dan teman-temannya justru akan menempatkan sang presiden direktur tetangga mereka itu sebagai sponsor untuk berbagai kegiatan pembangunan mau pun rekreasi di rukun tetangga tersebut. Bukankah pada gilirannya sang presiden direktur juga akan menentukan arah dari aktivitas di rukun tetangga itu?

Dalam kerangka itu Sen lebih pragmatis dan struktural. Dunia memerlukan pembaharuan institusional untuk memungkinkan terjadinya perubahan yang diperlukan supaya globalisasi itu menjadi pengaturan yang lebih adil.<sup>30</sup> Dia antara lain menuntut dibukanya pasar negara-negara maju untuk produsen negara-negara sedang berkembang serta humanisasi hak paten atas obat-obatan yang diperlukan untuk memerangi berbagai penyakit massal di dunia. Artinya, harus ada perubahan struktur global yang lebih emansipatif. John Rawls (1921-2002) malahan sudah sempat mendahului dengan rumus yang lebih praktis lagi: *“The Law of Peoples (we) would adopt is the law that we you and I, here and now would accept as fair in specifying the basic terms of cooperation among people”*.<sup>31</sup> Sulit untuk tidak membayangkan, bahwa *basic terms* itu ujung-ujungnya harus merupakan emansipasi dalam kesempatan untuk hidup lebih layak. Padahal itulah yang justru acapkali tidak direlakan oleh negara-negara dengan ekonomi dan industri yang sudah kuat. Ternyata merekalah yang lebih memerlukan proteksi ketimbang masyarakat-masyarakat yang kurang maju atau malahan tidak maju-maju, karena bagi orang miskin *they have nothing to lose*.

Yang menjadi tantangan kita adalah, negara-negara kaya dan masyarakat-masyarakat miskin itu sekarang berbaur dalam satu proses global yang kompetitif tetapi tidak seimbang sifatnya. Masalah besar dengan globalisasi adalah, bahwa di satu sisi dia tidak dapat dielakkan sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihentikan. Di sisi lain dia membawa kontroversinya sendiri karena bagaimana pun dia adalah hasil perbuatan manusia juga yang sarat dengan ketidak-sempurnaan. Globalisasi itu dalam memasuki masa depan suka atau tidak suka akan membelah masyarakat dunia sedemikian rupa, sehingga di satu sisi dia memaksa manusia untuk berkomunikasi dengan bahasa teknis yang universal. Globalisasi itu jadinya memberi kesan pertama seolah mengintegrasikan dunia. Di sisi lain dia akan semakin mengasingkan kesadaran individu (subjek) sedemikian rupa, sehingga massa terbesar akan merasa terpaksa kembali kepada asal-usul primordialnya yang paling sedikit adalah lebih akrab seperti keluarga, suku, agama dsb. Paradoks itu

mengakibatkan, bahwa tatanan globalisasi itu potensial untuk menyediakan suatu *level playing field* hanya untuk mereka yang mampu menggunakannya untuk memperoleh manfaat dari efisiensi ekonomi serta efektivitas teknologi. Konsekuensi selebihnya adalah bahwa globalisasi akan semakin menggusur massa terbesar dunia yang tidak berdaya-saing ke pinggiran kemiskinan yang pada akhirnya akan berdampak destruktif untuk *Lebenswelt* kita bersama.

Sementara itu, karena globalisasi itu tidak baru datang kemarin sore melainkan sudah bersemi di zaman Marco Polo (1254-1324), untuk saya doktrin abad XVIII yang mengatakan bahwa "*men are born free and equal*" lebih merupakan mythos ketimbang realitas. Dia adalah mythos yang masih harus diwujudkan dalam dunia nyata supaya orang bisa percaya pada maknanya, apalagi kebenaran isinya. Jika tidak, globalisasi juga membawa risiko besar bahwa dunia hidup kita (*Lebenswelt*) akan terjerumus ke dalam kubangan ketidak-adilan sedemikian rupa sehingga akan menggoda mereka yang putus asa karena dirugikan untuk bertindak sendiri. Terorisme adalah salah satu manifestasi daripadanya. Akibatnya adalah, jika kita tidak berhasil membangun peradaban yang lebih adil, kita memang akan berakhir dalam dunia yang sungguh-sungguh kaotis yang sulit untuk bisa disebut *Lebenswelt*. Dalam rangka mengibaskan kemungkinan suram itu Herbert Marcuse di penutup *One Dimensional Man* mengutip optimisme Walter Benjamin yang menyatakan bahwa "*Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben*" (Hanya demi mereka yang tak berpengharapan kita itu diberi pengharapan).<sup>32</sup> Sayangnya Marcuse tidak menjelaskan bahwa Benjamin sendiri akhirnya bunuh diri setelah putus asa menghadapi pengejaran tentara Nazi. Artinya, optimisme itu bukanlah jaminan bagi akan datangnya penyelamatan.

Globalisasi yang sedang melanda dunia itu juga mirip dengan semacam pengejaran yang membuat kita semakin tidak bisa bersembunyi di balik preteks apa pun, terlepas apakah dia cenderung merugikan atau menguntungkan kita. Sebelum *lengser keprabon*, Presiden Soeharto pernah menyatakan, bahwa "siap atau tidak siap, kita harus bisa menghadapi globalisasi". Dalam satu soal itu dia benar sekali. Globalisasi telah membuat aneka perbatasan yang memisahkan berbagai kelompok manusia menjadi semakin tidak relevan bagi interaksi peri-laku manusia di berbagai sektor kehidupan seperti terutama ekonomi, informasi, ekologi, teknologi, difusi antar-budaya dan masyarakat perdata (*civil society*).<sup>33</sup> Konsekuensinya adalah, dalam arus pergaulan hidup yang manca-arrah itu kita bukan hanya akan menerima segala manfaat dari kemajuan teknologi dan industri informasi, tetapi juga segala mudarat yang sebenarnya kita tidak akan pernah mau

menerimanya, andaikata kita bisa menutup diri terhadap globalisasi. Artinya, selain mendapatkan manfaat kemajuan di bidang medis, pertanian, maritim, investasi dan segala manfaat yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, kita juga akan kena tempas konflik, kemarahan, teror dan bahkan berbagai jenis frustrasi internasional yang sudah tidak peduli apakah mereka salah alamat atau tidak (ingat pernyataan G.W. Bush tentang *collateral damage*).

### **Peranan Indonesia**

Karena itu Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali melibatkan diri secara aktif dalam usaha membangun peradaban yang lebih adil itu. Bukan hanya karena kewajiban itu juga merupakan bagian implisit dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan, dan terutama karena kita adalah bagian dari dunia yang sama yang sedang *globalized*. Penolakan atau inkompetensi untuk ikut berperanan positif dalam proyek untuk membangun peradaban yang lebih adil itu akan mengakibatkan Indonesia bisa menjadi korban dari imperialisme peradaban (jangan samakan dengan peradaban imperialis) karena kelalaiannya sendiri. Jika kita gagal untuk ikut berperanan dalam mengarahkan proses lanjut dari globalisasi, kita cuma akan sekadar bisa tunduk pada kaidah-kaidah yang dibuat melalui mekanisme konvensi antar-bangsa dan antar-masyarakat, karena kita tidak (mampu) ikut serta dalam mengarahkan prosesnya.

Pada tingkat keadaan sekarang sudah barang tentu sukar untuk mengharapkan masyarakat Indonesia bisa ikut berperan banyak dalam proses pembentukan paradigma dunia yang baru menuju peradaban yang lebih adil. Sebab dasarnya terletak di satu sisi pada praksis pikir kita yang disiplin karena terpasung oleh kecemasan kalau-kalau melanggar *mythos* sosial yang kita buat sendiri (misalnya: kita adalah bangsa besar yang ramah-tamah), dan lebih sering lagi oleh kemalasan kita dalam menyusuri alternatif-alternatif baru. Di sisi lain kita mengukuhkan kebiasaan bertindak bebas yang nyaris liar seperti yang dapat kita amati sebagai keseharian di jalan-jalan dan kota-kota besar kita. Padahal kita hanya bisa ikut memberikan kontribusi yang kreatif kepada pembangunan peradaban baru jika masyarakat kita terdiri dari warga-negara yang mandiri dan kreatif. Namun tantangan besar kita adalah justru soal kreativitas yang mirip dengan *tipping point* itu: "*You don't teach the creative. It's a feeling. You have it, or you have it not*".<sup>34</sup> Kita memang tidak mungkin kreatif jika tidak mandiri. Kualifikasi itu nampaknya hanya bisa dicapai lewat pemikiran yang bebas

dari pasungan, karena hanya jika orang menalar independen, dia akan menghasilkan peri-laku disiplin yang sesuai dengan ethos yang mengacu kepada akal sehat (logos). Jelaslah bahwa kita harus mampu membebaskan diri dari pola peri-laku berpikir disiplin tetapi bertindak bebas, dan beringsut ke pola peri-laku berpikir bebas tetapi bertindak disiplin sebagaimana layaknya warga-negara yang bebas tetapi penuh tanggung jawab.

Walau demikian kemampuan menggunakan logos itu juga tidak jatuh dari langit. Dia membutuhkan pendidikan dan latihan yang terus menerus bagi warga-negara guna menjadi *reasoning citizen* untuk pada gilirannya bisa menjadi warga dari *reasoning public*. Artinya, pendidikan kita sudah dari tingkat dasar perlu dilengkapi dengan kurikulum yang tidak hanya memberikan budi pekerti, melainkan juga melengkapi si anak dan remaja dengan wawasan peradaban multikultural melalui penggencaran kembali pelajaran-pelajaran sejarah dunia dan geografi dunia. Revitalisasi dan pencerahan pendidikan itu mutlak kita perlukan karena globalisasi memang mensyaratkan penyesuaian diri dengan syarat-syarat kemasyarakatan baru.<sup>55</sup> Hanya dengan menyesuaikan diri dan tanggap terhadap tuntutan zaman kita bisa membangun masyarakat warga-negara yang mandiri dalam proses globalisasi dan mampu memberikan kontribusi kepada peradaban, ketimbang terus tergantung dari pemerintah (apalagi yang kemampuannya serba terbatas karena juga lahir dari para warga-negara yang sama-sama serba terbatas kecakapannya). Dengan begitu kita juga tidak perlu bersandar pada belas kasihan kekuatan-kekuatan asing yang pada dasarnya tidak akan membuka jalan menuju emansipasi jika dia tidak merasa terpaksa untuk itu. Telah terbukti bahwa teori evolusi Charles Darwin yang mengedepankan doktrin *survival of the fittest* tidak hanya berlaku bagi sejarah alam, melainkan juga bagi sejarah peradaban. Hukum alam memang adalah tidak lain dari kompetisi, betapa pun tidak “kekeluargaan” kedengarannya. Karena itu, jika ada yang relevan dari Friedrich Nietzsche untuk Indonesia, nampaknya hentakan *der Wille zur Macht* (kehendak untuk berkuasa)<sup>56</sup> yang lumayan kondang di Indonesia itu harus diarahkan kepada kehendak untuk berkuasa atas kemalasan dan kebodohan kita sendiri.

Untuk membangun kemandirian warga-negara kita, ada baiknya kita belajar dari peribahasa Belanda yang memaklumkan bahwa “*Ieder zorgt voor zichzelf, en God voor ons allen*” (masing-masing orang mengurus diri sendiri, dan Tuhan mengurus kita semua). Besar kemungkinan peribahasa itu tumbuh karena orang Belanda senantiasa menghadapi alam yang keras, sehingga kebersamaan hidup mereka menuntut kemandirian maksimal dari setiap warga-negaranya. Ini terbalik dengan di Jawa di mana orang memang suka percaya bahwa “*dhabar mboten dbabar ingkang prayogi kempal*”.<sup>57</sup> Jika

filosofi ini dibiarkan subur, tak pelak lagi kita memang akan menjadi sekumpulan *failed citizens*. Tentu saja tendens itu tidak bisa dibiarkan, terutama karena seperti kata Anthony Giddens, globalisasi itu sedang mentransformasi hidup kita semua secara spatial mau pun temporal tanpa bertanya apakah kita menyukainya atau tidak: "*Distant events, whether economic or not, affect us more directly and immediately than ever before*".<sup>38</sup> Dengan begitu dari sejarah tiada akan ada maaf bagi kita, jika kita gagal ambil bagian dan ikut serta menentukan arah globalisasi menuju peradaban yang lebih adil, baik karena lalai, salah-urus dan apalagi karena *failed governance*.

Seperti yang sudah dikonstatasi oleh Ulrich Beck satu dekade yang lalu, kita memang hidup di zaman masyarakat sarat risiko. Ke depan keadaan ini bisa membawa dua akibat: manusia sanggup mengatasi risiko itu dan menjadi semakin manusiawi, atau manusia menyerah pada risiko dan lantas mengalami implosi untuk pada ujungnya mengakhiri rasinya sebagai manusia. Kendati begitu Beck nampaknya lupa untuk bilang satu hal, yaitu bahwa manusia itu adalah pembuat risikonya sendiri juga. Di situlah subjek harus naik lagi ke permukaan yang tertantang untuk mengatasi hasil buaatannya sendiri. Itulah sebabnya mengapa subjek tidak boleh menyerah kepada imajinasinya sendiri. Sekali lagi merujuk kepada Baudrillard, bahwa manusia itu dalam usaha membuat hidupnya semakin canggih seperti yang memang dipercaya dalam teori spiral antropologi, dia sekaligus juga semakin tersesat dalam kebudayaan sebagai objek yang dibuatnya sendiri. Martin Heidegger (1889-1976) juga pernah mengingatkan risiko yang mirip.<sup>39</sup> Kesesatan itu memang bisa membuat kita bingung dan bahkan juga mengambil sikap fatalistik. Namun justru di situ manusia ditantang untuk mengatasi kesesatannya sendiri. Untuk itu manusia memiliki kapasitas untuk setiap kali menampak cakrawala baru yang malaikat tidak punya (karena tidak perlu) dan hewan juga tidak punya (karena tidak mengerti). Di penutup bukunya, Amartya Sen menulis: "*We have to make sure, above all, that our mind is not halved by a horizon*".<sup>40</sup> Itu sejatinya juga mengukuhkan, bahwa jangkauan kita untuk masa depan yang lebih baik ditentukan oleh sejauh mana nalar kita bisa menjelajahi cakrawala peradaban baru yang lebih adil.

**End Notes:**

1. Naskah ini sejatinya merupakan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Filsafat Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, nomor 31973/A2.7/K/2006 tanggal 28 Februari 2006.
2. Arthur Kaufmann & W. Hassemer (Eds.). *Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart*, Heidelberg: UTB, 1994: 1. Perlu dikemukakan bahwa tidak selalu ada kesepakatan mengenai persoalan ini. Niklas Luhmann melihatnya terbalik: para filosof telah selalu sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang abstrak, sehingga tidak terhindarkan bahwa para yuris lalu berkepentingan terhadap penyelesaiannya: *Das Recht der Gesellschaft*, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1993: 12-13.
3. "Subjek itu didominasi oleh objek yang tidak bisa diramalkan perilakunya", John Lechte, *50 Filsuf Kontemporer, dari Strukturalisme sampai Postmodernisme*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003: 357.
4. Lihat Arie de Ruijter, *Een Speurtocht naar het Denken, een Inleiding tot het Structuralisme van Claude Lévi-Strauss*, Assen: van Gorcum, 1979: 14. Pernyataan ini dikutip juga oleh Kees Bertens dalam *Panorama Filsafat Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987: 37. Sementara itu Lacan menyatakan "manusia sudah tergeser dari pusatnya" dan Foucault memaklumkan "kematian manusia sebagai kategori", dan tokoh yang tak masuk kalangan strukturalis seperti Paul Ricœur malahan bilang bahwa emansipasi mensyaratkan manusia untuk membebaskan diri dari keterbatasan tubuhnya, lihat Kees Bertens, *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II: Prancis*, Jakarta: Gramedia, 1996: 206, 217, 270.
5. Kalimat yang memuat rumus "cogito, ergo sum" yang termashur itu: "I think, therefore I am, which assures me that I am speaking the truth, except that I see very clearly that in order to think one must exist...", René Descartes, *Discourse On Method And The Meditations*, London: Penguin Classics, [1673] 1968: 54.
6. Jürgen Habermas (1929-) mengambil posisi yang mirip dalam soal manusia sebagai subjek: *Die postnationale Konstellation - Politische Essays*, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1998: 199. Lihat juga Jürgen Habermas, *Der philosophische Diskurs der Moderne*, Frankfurt/Main: Suhrkamp, [1985] 1998: 28, 132.
7. Jim Leffel, "Our New Challenge: Postmodernism", dalam: Dennis McCallum, ed., *The Death of Truth*, Minneapolis: Bethany House Publishers, 1996: 31.
8. Isaiah Berlin, "The Idea of Pluralism", dalam: Walter Truett Anderson, ed., *The Truth About The Truth*, New York: GP Putnam's Sons, 1995: 48. Kutipan ini dari naskah saya *Cultural Relativism Revisited Amidst Globalization, Paper for the International Conference on Civilization and Culture: Culture as Burden and Opportunity, organized by the Faculty of Philosophy, Parahyangan Catholic University, Bandung, Indonesia, 18-20 July 2006*.
9. *Newsweek*, 25 September 2006: 60.
10. Haass, Richard N., "The New Middle East" dalam *Newsweek*, 8 Januari 2007.
11. Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York: Simon & Schuster, 1996: 41, mengutip Bozeman.
12. *Ibid.*
13. Robertson, Roland, "Civilization", dalam *Theory, Culture & Society*, Vol.23, London: SAGE Publications, 2006: 422-423. Chen, Kuan-Hsing, "Civilizationism", dalam *Theory, Culture & Society*, Vol.23, London: SAGE Publications, 2006: 427-428.



14. Amartya Kumar Sen, *Identity and Violence: the Illusion of Destiny*, New York/London: W.W. Norton, 2006.
15. C.C.W. Taylor dalam A.A. Long (ed.), *Early Greek Philosophy*, Cambridge: Cambridge UP, 1999: 190.
16. Habermas, *Der philosophische Diskurs der Moderne*: 28.
17. Jürgen Habermas, *Erläuterungen zur Diskursethik*, Frankfurt/Main: Suhrkamp, [1991] 1992: 61.
18. Herbert Marcuse, *One Dimensional Man*, Beacon Press, [1964] 1968.
19. Erich Fromm, *Escape From Freedom*, New York: Avon, [1941] 1971: pp. 128, 138: *Man has built his world. ... But he has become estranged from the products of his own hands, he is not really the master of the world he has built; on the contrary, this man-made world has become his master...*
20. Sen: 45.
21. Sen: 124.
22. Sen: 19.
23. Sen: 38.
24. Habermas, *Erläuterungen zur Diskursethik*: 61.
25. Dario Castiglione, "The Political Theory of the Constitution", dalam Richard Bellamy & Dario Castiglione, *Constitutionalism in Transformation: European and Theoretical Perspectives*. Oxford: Blackwell, 1996: 20.
26. Newsweek, 7 March 2005: *Like a Virus that Spreads*.
27. Newsweek, 24 July 2006, *Russian President Vladimir Putin, responding to U.S. President George W. Bush's suggestion that Russia should be more democratic*.
28. *Time*, 5 March 2007.
29. Sen: 167.
30. Sen: 182.
31. John Borden (Bordley) Rawls, *The Law Of Peoples*, Harvard University Press, 1999: 45.
32. Marcuse: 257.
33. Ulrich Beck, *What Is Globalization?* (aslanya: *Was ist Globalisierung?*), Cambridge: Polity Press [1997] 2003: 20.
34. Andrea Zigiotti, ahli industri sutra Italia dalam *Time*, 7-14 Agustus 2006.
35. Ulrich Beck mengutip Reinhard Kahl: *Globalisierung zwingt zu einer reorientierung des Lernens. Ibid*: 138.
36. Friedrich Nietzsche, *Also Sprach Zarathustra*, Stuttgart: Philip Reclam, 1994: 119.
37. Ujar-ujar inilah yang lebih kesohor sebagai "mangan ora mangan pokok kumpul".
38. Anthony Giddens, *The Third Way, The Renewal of Social Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1998: 31.
39. Bertens, K. tentang Heidegger: *Filsafat Barat Kontemporer, Inggris-Jerman*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002: 171.
40. Sen: 186.